



IBN KHALDUN

Ardiyan Syah Abdi Negara¹, Abidin Latua²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: abdinegaraardiansyah591@gmail.com¹, abidinlatua11@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 19-05-2025

Revised : 21-05-2025

Accepted : 23-05-2025

Pulished : 25-05-2025

Abstract

This journal discusses the political thought of Ibn Khaldun, a 14th-century Muslim scholar renowned as a pioneer of sociology, historiography, and Islamic political theory. Through his seminal work Muqaddimah, Ibn Khaldun introduced the concept of ashabiyah (social cohesion) as the foundation of political power, and formulated a dynastic cycle theory describing the rise and fall of states. He also emphasized the crucial relationship between religion and political authority. This study adopts a qualitative-descriptive method through literature review. The findings reveal that Ibn Khaldun's political thought remains highly relevant for understanding power dynamics and for developing just and ethical governance models. The article invites further consideration of his ideas as a valuable reference for contemporary Islamic political philosophy.

Keywords: *Ibn Khaldun, ashabiyah, Islamic politics, theory of power, political philosophy*

Abstrak

Jurnal ini membahas pemikiran politik Ibn Khaldun, seorang pemikir Muslim abad ke-14 yang dikenal luas sebagai pelopor ilmu sosiologi, sejarah, dan politik Islam. Melalui karya monumentalnya Muqaddimah, Ibn Khaldun menawarkan teori ashabiyah sebagai fondasi kekuasaan politik dan siklus dinasti yang menjelaskan tahapan lahir hingga runtuhnya suatu negara. Ia juga menyoroti pentingnya hubungan antara agama dan negara dalam menjaga stabilitas politik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun sangat relevan dalam memahami dinamika kekuasaan dan membangun model kenegaraan yang berkeadilan. Artikel ini mengajak pembaca untuk menempatkan pemikiran Ibn Khaldun sebagai rujukan penting dalam pengembangan filsafat politik Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Ibn Khaldun, ashabiyah, politik Islam, teori kekuasaan, filsafat politik.*

PENDAHULUAN

Peradaban Islam pada abad pertengahan dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah intelektual umat manusia. Dalam periode ini, dunia Islam tidak hanya menjadi pusat perkembangan ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan kalam, tetapi juga melahirkan pemikir-pemikir besar dalam bidang filsafat, sains, dan politik. Salah satu tokoh yang menonjol adalah Ibn Khaldun (1332–1406 M), seorang sejarawan, sosiolog, dan filsuf politik Muslim yang karya-karyanya tetap relevan hingga saat ini. Pemikiran Ibn Khaldun menunjukkan karakteristik khas: analitis, realistis, dan multidisipliner, yang menjadikannya tokoh luar biasa dalam tradisi keilmuan Islam dan global. (Rahman Zainudin, 1992)

Lahir di Tunis pada 1 Ramadhan 732 H, Ibn Khaldun hidup pada masa ketika peradaban Islam mengalami masa-masa penuh gejolak. Setelah kehancuran Baghdad oleh bangsa Mongol pada 1258 M, dunia Islam menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Fragmentasi kekuasaan,



perang antardinasti, serta kemunduran moral dalam pemerintahan menjadikan umat Islam kehilangan arah politik dan intelektual. Di tengah situasi yang tidak menentu tersebut, Ibn Khaldun tumbuh dan berkembang, menempuh pendidikan dari para ulama besar, sekaligus terlibat aktif dalam berbagai birokrasi pemerintahan di wilayah Maghrib, Andalusia, dan Mesir. Kombinasi antara pendidikan keilmuan klasik dan pengalaman praktis dalam dunia politik menjadikannya pemikir yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif. (Ibn Khaldun, 1951)

Karya utamanya, *Kitab al-‘Ibar*, terutama bagian pengantarnya yang dikenal dengan nama *Muqaddimah*, menjadi magnum opus yang melahirkan fondasi bagi ilmu-ilmu sosial. Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menyajikan pendekatan ilmiah yang luar biasa terhadap dinamika sejarah, kekuasaan, masyarakat, ekonomi, dan budaya. Ia mengkritik pendekatan sejarah konvensional yang cenderung naratif dan apologetik, dengan menawarkan pendekatan baru yang berbasis pada analisis kausalitas, perubahan sosial, dan struktur kekuasaan. Hal inilah yang menjadikan Ibn Khaldun bukan sekadar seorang sejarawan, tetapi juga sosok yang dianggap sebagai *bapak sosiologi*, bahkan oleh para akademisi Barat modern seperti Arnold Toynbee dan Ernest Gellner. (Muhammad Ibnu Thawit al-Tanji, 1951)

Salah satu sumbangsih paling signifikan Ibn Khaldun dalam bidang filsafat politik adalah konsep *ashabiyah*, yaitu solidaritas kelompok atau semangat kolektif yang menjadi kekuatan utama dalam pembentukan dan keberlangsungan suatu pemerintahan atau dinasti. Dalam pandangannya, tidak ada kekuasaan yang mampu bertahan tanpa dukungan kekuatan sosial dari kelompok yang solid. *Ashabiyah* bukan sekadar ikatan darah, melainkan kesadaran kolektif yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan kepentingan bersama. Dari konsep ini, Ibn Khaldun menyusun teori siklus dinasti, yang menggambarkan proses naik-turunnya sebuah pemerintahan dalam lima fase yang berulang. (Muhammad Abdullah Enan, 1979)

Selain itu, Ibn Khaldun juga menunjukkan ketajaman berpikir dalam merumuskan hubungan antara agama dan negara. Berbeda dari banyak pemikir klasik yang mengidealkan kekuasaan teokratis atau sekular sepenuhnya, ia mengajukan model yang integratif. Menurutnya, agama berfungsi sebagai perekat moral dan nilai yang menjaga stabilitas kekuasaan. Pemerintahan yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan antara rasionalitas politik (*siyasah ‘aqliyah*) dan nilai-nilai keagamaan (*siyasah diniyah*). Dengan demikian, ia menyampaikan pandangan yang moderat dan kontekstual, serta sangat aplikatif dalam konteks kenegaraan modern, khususnya di negara-negara Muslim yang sedang mencari model politik yang adil dan berakar pada nilai-nilai Islam. (Ali Abdul Wahid Wafi, Abd al-Rahman Khaldun, 1985)

Tidak kalah penting, Ibn Khaldun juga melakukan reinterpretasi kritis terhadap doktrin-doktrin politik klasik, seperti syarat bahwa pemimpin umat Islam harus berasal dari suku Quraisy. Ia berargumen bahwa kekuasaan harus didasarkan pada kemampuan, solidaritas, dan legitimasi sosial, bukan semata-mata keturunan atau nasab. Sikap kritis ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldun bukan sekadar pewaris tradisi klasik, tetapi juga pembaharu yang berani menyesuaikan ajaran-ajaran politik Islam dengan konteks zamannya. Dalam hal ini, ia telah lebih dulu menyuarakan prinsip meritokrasi yang hari ini menjadi prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan modern. (Erwin IJ Rosenthal, 1962)

Mengingat kompleksitas dan kedalaman pemikiran Ibn Khaldun, studi terhadap karya dan gagasannya sangat penting dilakukan, terutama dalam rangka membangun kembali epistemologi



politik Islam yang berbasis pada realitas dan nilai. Di tengah krisis kepemimpinan dan disintegrasi sosial yang melanda banyak negara Muslim saat ini, pemikiran Ibn Khaldun dapat menjadi rujukan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada solidaritas sosial. Lebih dari itu, kerangka berpikir Ibn Khaldun juga sangat relevan dalam mengembangkan teori sosial-politik yang kontekstual, tidak hanya untuk dunia Islam, tetapi juga dalam diskursus global tentang kekuasaan, legitimasi, dan perubahan sosial. (Ibn Khaldun, 2006)

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dan sistematis pemikiran politik Ibn Khaldun dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) konsep *ashabiyah* sebagai fondasi kekuasaan; (2) teori siklus dinasti sebagai kerangka historis-politik; dan (3) hubungan antara agama dan negara dalam kerangka pemikiran politik Islam. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian pustaka, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan wacana filsafat politik Islam, serta menjadi jembatan antara pemikiran klasik dan tantangan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data utama diperoleh dari karya-karya Ibn Khaldun, khususnya *Muqaddimah* dan *Kitab al-'Ibar*, serta literatur sekunder dari para sarjana Muslim maupun Barat yang mengkaji pemikirannya. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis), yaitu menelaah isi teks secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam pemikiran politik Ibn Khaldun, termasuk *ashabiyah*, teori siklus dinasti, serta integrasi antara agama dan kekuasaan. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai interpretasi atas teks primer dari sumber-sumber otoritatif yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis Kehidupan Ibn Khaldun dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Politik

Ibn Khaldun lahir pada 1 Ramadhan 732 H (7 Mei 1332 M) di Tunis, dalam keluarga terpelajar yang memiliki garis keturunan Arab Selatan. Masa hidupnya berada dalam periode transisi sejarah Islam yang sangat penting, ketika peradaban Islam mengalami guncangan akibat serangan bangsa Mongol, kehancuran Baghdad (1258), serta dekadensi kekuasaan Islam di berbagai wilayah. Ia menyaksikan secara langsung kehancuran struktur sosial-politik yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan antardinasti, lemahnya institusi keagamaan, serta pergeseran moral dalam masyarakat Islam. (Deliar Noer, 1997)

Pengalaman langsung Ibn Khaldun dalam dunia pemerintahan, baik sebagai sekretaris kerajaan, diplomat, perdana menteri, maupun hakim agung, menjadikannya satu dari sedikit pemikir Muslim klasik yang memiliki kombinasi antara pengalaman empirik dan refleksi teoretis. Kehidupan politik yang dijalannya penuh dengan intrik, pergantian kesetiaan, bahkan pengkhianatan, yang justru menjadi sumber penting bagi lahirnya teori-teori politik yang bersifat realistik. Dalam konteks ini, pemikiran Ibn Khaldun tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-politik tempat ia hidup. Ia menjadi saksi sekaligus partisipan dalam peristiwa-peristiwa besar yang membentuk watak analitis dan kritisnya. (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1996)



Konsep *Ashabiyah* sebagai Pilar Kekuasaan

Konsep *ashabiyah* merupakan sumbangan orisinal Ibn Khaldun dalam teori politik Islam. *Ashabiyah* merujuk pada solidaritas sosial atau semangat kolektif dalam suatu kelompok masyarakat yang menjadi faktor pengikat kuat untuk menopang kekuasaan politik. Dalam pandangan Ibn Khaldun, kekuasaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa fondasi sosial yang kuat. Solidaritas kelompok menjadi energi penggerak bagi kemunculan dinasti dan pemerintahan. (Yosi Aryanti, 2018)

Ashabiyah tidak hanya terbentuk karena kesamaan darah, tetapi bisa lahir dari kesamaan kepentingan, nasib, ideologi, bahkan kepercayaan agama. Dalam konteks historis, suku Quraisy memperoleh dominasi politik pada masa awal Islam karena memiliki tingkat *ashabiyah* yang kuat. Namun, Ibn Khaldun menekankan bahwa *ashabiyah* memiliki sifat dinamis. ia tumbuh, menguat, melemah, dan bisa hilang. (Indra pratama, 2020)

Pentingnya *ashabiyah* dalam politik tercermin dari analisis Ibn Khaldun terhadap transisi masyarakat nomaden (*badawah*) ke masyarakat urban (*hadharah*). Dalam masyarakat nomaden, *ashabiyah* biasanya kuat karena mereka menghadapi kondisi hidup yang keras dan bergantung pada solidaritas kelompok untuk bertahan. Ketika kelompok ini kemudian menguasai suatu wilayah dan membentuk negara, mereka mulai hidup dalam kemewahan yang justru melumpuhkan kekuatan *ashabiyah*. Maka, *ashabiyah* adalah kekuatan awal, tetapi juga bisa menjadi titik awal kemunduran apabila digantikan oleh individualisme dan kemewahan yang menjauh dari semangat kolektif. (Montanah dkk, 2024)

Konsep ini sangat relevan untuk konteks negara modern, di mana solidaritas sosial dan rasa kebersamaan menjadi pilar penting dalam menjaga kohesi nasional. Ketika *ashabiyah* digantikan oleh politik identitas yang sempit atau kepentingan ekonomi oligarkis, negara akan menghadapi fragmentasi sosial dan instabilitas politik.

Teori Siklus Dinasti: Sebuah Pendekatan Historis-Politik

Salah satu teori monumental Ibn Khaldun adalah teori siklus dinasti (*dawlah*). Menurutnya, setiap pemerintahan atau dinasti mengalami lima fase utama, yaitu:

1. Fase pendirian dan perjuangan, ditandai oleh semangat kolektif dan kepemimpinan yang kuat.
2. Fase konsolidasi kekuasaan, ketika struktur pemerintahan dibangun dan hukum ditegakkan secara efektif.
3. Fase kemakmuran dan stabilitas, di mana pembangunan mencapai puncaknya, dan legitimasi politik sangat kuat.
4. Fase kemewahan dan pengabaian nilai, ketika para pemimpin mulai hidup mewah, meminggirkan rakyat, dan melupakan cita-cita awal.
5. Fase dekadensi dan kehancuran, ditandai oleh melemahnya *ashabiyah*, korupsi, dan kehilangan legitimasi, hingga akhirnya dinasti digantikan oleh kekuatan baru yang masih memiliki semangat kolektif. (Kandiri, 2014)

Teori ini sangat progresif karena menekankan pentingnya *dinamika kekuasaan* sebagai proses yang tidak statis. Ibn Khaldun adalah pemikir Muslim pertama yang menekankan hukum



sebab-akibat dalam sejarah. Ia menolak pendekatan mistis atau takdir dalam memahami naik-turunnya kekuasaan, dan menggantikannya dengan pendekatan sosiologis dan empiris.

Dengan kerangka ini, Ibn Khaldun berhasil menggabungkan analisis historis, teori politik, dan sosiologi dalam satu kesatuan yang sistematis. Bahkan, konsep ini dianggap mendahului teori modern tentang *cyclical theory of history* yang ditemukan dalam tradisi filsafat politik Barat.

Relasi antara Agama dan Negara

Dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldun membagi bentuk kekuasaan menjadi dua kategori utama: siyasah diniyah (politik berbasis wahyu/agama) dan siyasah 'aqliyah (politik berbasis rasionalitas manusia). Menurutnya, kekuasaan yang ideal adalah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan tata kelola rasional. Agama, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi, tetapi juga sebagai penjaga moralitas kekuasaan. (Ahmad khalwani, 2019)

Tanpa nilai agama, kekuasaan akan mengalami kecenderungan tiranik dan penyimpangan dari tujuan asasi kemanusiaan. Sebaliknya, agama yang dipolitisasi tanpa rasionalitas dan pengelolaan yang baik akan menjadi alat kekuasaan yang opresif. Ibn Khaldun mengusulkan sebuah sintesis, di mana etika religius dan rasionalitas politik berpadu dalam bingkai kenegaraan yang berkeadilan.

Pandangan ini relevan dengan perdebatan modern mengenai sekularisme, demokrasi Islam, dan negara berbasis nilai. Ibn Khaldun bukanlah pendukung teokrasi, tetapi juga tidak mendukung sekularisme absolut. Ia menempatkan agama sebagai unsur etis dan spiritual yang memberi arah bagi kekuasaan.

Tafsir Kritis terhadap Syarat Quraisy dalam Kepemimpinan

Tradisi politik Sunni klasik menetapkan syarat bahwa seorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy, mengacu pada sabda Nabi dan sejarah awal kekhilafahan. Namun, Ibn Khaldun melakukan kritik terhadap syarat ini. Ia menegaskan bahwa kekuasaan tidak bergantung pada nasab atau garis keturunan, tetapi pada kemampuan aktual dalam memimpin, membangun solidaritas, dan melindungi masyarakat. (Romziana dkk, 2023)

Menurutnya, syarat Quraisy relevan dalam konteks sosial politik abad pertama Hijriyah, ketika suku Quraisy masih menjadi simbol kekuatan sosial dan agama. Namun, dalam konteks abad ke-14, otoritas Quraisy telah melemah, dan banyak pemimpin yang lebih layak berasal dari suku lain dengan kekuatan *ashabiyah* yang kuat. (Moh. Zainnul Muttaqien dkk, 2022)

Dengan pandangan ini, Ibn Khaldun secara tidak langsung menawarkan reinterpretasi politik Islam yang adaptif terhadap konteks zaman. Ini menjadi sangat penting dalam diskursus modern mengenai demokrasi dalam Islam dan inklusivitas kepemimpinan umat Islam.

Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun dalam Politik Kontemporer

Pemikiran Ibn Khaldun tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam memahami fenomena sosial-politik kontemporer. Dalam konteks negara-negara Muslim modern, teori *ashabiyah* dapat digunakan untuk menilai kohesi sosial di tengah keragaman etnis, agama, dan ideologi. Negara yang kehilangan *ashabiyah* karena konflik internal, kesenjangan sosial, dan krisis legitimasi sangat rentan terhadap disintegrasi. (Zulfan Effendi, 2024)



Siklus dinasti Ibn Khaldun juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang tidak berpijak pada nilai-nilai moral dan keadilan akan mengalami kejatuhan, meskipun tampak kuat secara institusional. Banyak pemerintahan otoriter modern jatuh karena korupsi dan ketimpangan, sebagaimana digambarkan dalam fase dekadensi dalam teori Ibn Khaldun. (Theodora Indah Jati, 2024)

Kontribusi Ibn Khaldun juga terlihat dalam ilmu sosial modern. Tokoh-tokoh seperti Arnold Toynbee, Ernest Gellner, dan bahkan sosiolog seperti Durkheim dan Weber, mengakui pentingnya karya Ibn Khaldun dalam membangun fondasi ilmu sejarah dan masyarakat. Konsep-konsep seperti *social cohesion*, *historical cycles*, dan *charismatic authority* memiliki kesamaan substansial dengan gagasan Ibn Khaldun. (Mutamakin, and M. Yusuf Agung Subekti, 2021)

KESIMPULAN

Ibn Khaldun merupakan salah satu pemikir Islam paling berpengaruh dalam sejarah intelektual dunia Islam. Pemikirannya dibentuk oleh pengalaman panjangnya dalam dinamika sosial-politik dunia Islam abad ke-14, menjadikannya tidak hanya seorang teoritikus, tetapi juga praktisi yang memahami realitas kekuasaan secara mendalam. Kontribusi utamanya terletak pada pengembangan konsep *ashabiyah* sebagai kekuatan utama dalam membangun dan mempertahankan kekuasaan, serta teori siklus dinasti yang menjelaskan secara sistematis tentang lahir, berkembang, dan runtuhnya suatu pemerintahan.

Selain itu, Ibn Khaldun berhasil membangun hubungan yang seimbang antara agama dan negara melalui konsep *siyasah diniyah* dan *siyasah 'aqliyah*, yang mengintegrasikan nilai-nilai etika keagamaan dengan rasionalitas politik. Penafsiran ulang terhadap syarat kepemimpinan seperti keturunan Quraisy juga menunjukkan sikap kritis dan adaptif dalam pemikiran politik Islam.

Relevansi pemikiran Ibn Khaldun masih sangat terasa hingga kini, terutama dalam menelaah dinamika kekuasaan, legitimasi politik, serta pentingnya solidaritas sosial dalam membangun stabilitas negara. Teorinya dapat menjadi fondasi penting dalam mengembangkan model pemerintahan Islam modern yang tidak hanya berbasis legal-formal, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai moral, etis, dan sosiologis.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, penulis menyarankan agar:

1. Pemikiran Ibn Khaldun lebih diarusutamakan dalam kurikulum pendidikan politik Islam, filsafat sosial, dan sejarah peradaban agar generasi Muslim dapat menggali kekayaan warisan intelektual Islam yang bernilai ilmiah tinggi.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji komparasi antara teori Ibn Khaldun dan pemikir modern, seperti Max Weber atau Antonio Gramsci, untuk memperluas wawasan dan mengontekstualisasikan pemikiran klasik ke dalam tantangan kontemporer.
3. Para pengambil kebijakan dan pemimpin umat Islam dapat mengambil inspirasi dari kerangka etis-politik Ibn Khaldun dalam membangun tatanan negara yang adil, partisipatif, dan berbasis pada solidaritas sosial serta nilai-nilai keadilan.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Al-Khudairi, Zainab, *Filasafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung: Pustaka, 1987).
- Aryanti, Yosi. "Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik." *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* vol 2 no. 2 (2018).
- Ba'ali, Fuad dan Ali Mawardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989).
- Esposito, Jhon L., (ed), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001).
- Efendi, Zulfan. "Ibnu Khaldun dan teori peradaban: Relevansi pemikirannya dalam dunia modern." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.6 (2024): 2198-2210.
- Jati, Theodora Indah, dkk. "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer." *Social Science Academic* 2.2 (2024): 251-262.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah* (Cairo: Dar Al-Kasyaf, TT)
- Kandiri, Kandiri. "Ibnu Khaldun Pencetus Teori Siklus." *Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 8.2 (2014): 249-266.
- Khalwani, Ahmad. "Relasi Agama dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2.2 (2019): 107-120.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Muttaqien, Moh Zainul, Muhammad Syawwaludin Nur, and Fatimah Aprilia. "Konsep Pemimpin Menurut Sayyid Quthb dan M Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran dan Tafsir Misbah." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1.3 (2022): 1034-1051.
- Mutamakin, Mutamakin, and M. Yusuf Agung Subekti. "Relevansi Pemikiran Pendidikan Ibn Khaldun Di Indonesia." *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3.2 (2021): 157-172.
- Montanah, Fauzan, Zahira Gefira, and Kurniati Kurniati. "Teori Kenegaraan Ibnu Khaldun dan Implikasi Etisnya dalam Pemikiran Politik Islam." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* vol 2 no. 3 (2024): 316-329.
- Pratama, Indra. *Agama Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Ibnu Khaldun*, (Diss. UIN Raden Intan Lampung) 2020.
- Rosenthal, Erwin IJ. *Political Thought in Medieval Islam*. Cambridge: Cambridge University Press. 1962.
- Romziana, Luthviyah, and Linda Fajarwati. "Analisis Kritis M. Quraish Shihab Terhadap Karakteristik Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Mishbah." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6.2 (2023): 191-209.